



DIY Lockdown?

Sultan: Satu-satunya Cara Mengadang Covid-19

Kita belum tentu bisa mencari jalan keluar. Satu-satunya jalan, ya, lockdown.



Sri Sultan HB X
Gubernur DIY

YOGYA, TRIBUN - Laju penyebaran Covid-19 seakan sulit sekali dibendung. Berbagai upaya pembatasan sosial terus digalakkan, tapi tidak menunjukkan hasil signifikan. Secara tegas, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan, jika situasi Covid-19 di DIY terus mengalami kenaikan dan sulit dikendalikan, jalan satu-satunya maka harus dilakukan lockdown atau karantina wilayah.

"Kami kan sudah bicara PPKM (Penerapan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat) mikro ini sudah bicara nangani di tingkat RT/RW dan padukuhan. Kalau itupun gagal, mobilitasinya seperti ini, ya, kan kalau weekend terus mau apalagi? Ya, lockdown," ucap Sultan di Kepatihan, Jumat (18/6) siang.

Raja Yogyakarta yang memiliki nama muda Bendoro Raden Mas Herjuno Darpito ini menjelaskan, para pemangku kebijakan di tingkat kabupaten/kota sudah berbiacara karantina di masing-masing

• ke halaman 11

Saatnya Karantina

- Laju penularan Covid-19 di DIY menunjukkan tren mengkhawatirkan dengan rata-rata 500 kasus per hari.
- Upaya mengadang penularan dengan PPKM mikro seakan tidak mempan. Aktivitas warga tetap tinggi.
- Sri Sultan HB X mewacanakan menerapkan lockdown untuk menahan laju penularan virus corona ini.
- Pemkab/pemkot akan ditanya mengenai kesiapan mereka jika lockdown akan diterapkan.
- Kalangan DPRD DIY mendukung penerapan lockdown karena laju penularan terus meningkat.
- Jumat (18/6) ada tambahan 562 kasus positif Covid-19 di DIY.

Pada hari yang sama terdapat tambahan 12 kasus meninggal akibat virus corona. Tingkat keterpakatan tempat tidur RS rujukan menunjukkan gejala semakin kritis.

GRAFIS: FAUZIARAKHMAN

Instansi	
1.	☐
2.	☐
3.	☐
4.	☐
5.	☐

DIY Lockdown?

● Sambungan Hal 1

wilayah.

Pihaknya akan menggelar rapat dengan Satgas Covid-19 tingkat kabupaten/kota dan para dokter pada Senin pekan depan. "Kami baru mendengar Senin siang kami akan rapat bersama, baik dengan dokter-dokter, atau (pemerintah) kabupaten/kota," jelas Sultan.

Dalam rencana rapat kerja tersebut, Sultan akan menanyakan apakah kabupaten/kota sanggup untuk lebih melakukan pengetatan ekstra kepada masyarakat atau tidak. Pasalnya, dalam kebijakan PPKM mikro yang sudah diberlakukan selama ini, Pemda DIY sudah mengeluarkan perintah supaya dilakukan pengontrolan hingga ke tingkat RT/RW.

"Mereka (kabupaten/kota) mau lebih menegatkan masyarakat atau enggak. Karena kami sudah bicara soal ngontrol di tingkat RT/RW. Kalau gagal *arep ngopo meneh?* (Kalau gagal mau apa lagi?)," ujar Sultan. "Kita belum tentu bisa mencari jalan keluar. Satu-satunya jalan, ya, *lockdown*," tegasnya.

Sri Sultan turut menyinggung terkait isi Instruksi Gubernur (Ingub) yang dikeluarkan oleh dirinya, yakni terkait izin pelaksanaan suatu acara di tengah kebijakan PPKM Mikro harus berdasarkan rekomendasi

kapanewon.

"Mungkin sudah baca yang Ingub 15. Kemarin sudah sampai menyelenggarakan aktivitas masyarakat itu tidak cukup keputusan kalurahan, harus kapanewon. Itu dengan harapan makin ketat," urai Sultan.

Di samping itu, alasan lain untuk kemungkinan dilakukan *lockdown* menurut Sultan, lantaran kapasitas *Bed Occupancy Rate* (BOR) atau persentase pemakaian tempat tidur di rumah sakit sudah mencapai 75 persen.

Sementara analisisnya, grafik penularan Covid-19 saat ini cenderung fluktuatif. Berbeda dengan awal virus tersebut muncul pada awal 2020 lalu. "Mungkin grafiknya fluktuatif tidak ada *peak* gitu. Tapi *nyatane ora mung* (nyatanya tidak cuma) Indonesia. Seluruh dunia, ya, turun begitu, semu," jelasnya. "Nah, tapi saya enggak tahu. Sekarang yang mestinya BOR rumah sakit itu 36 koma sekian persen, sekarang kira-kira 75 persen," jelasnya.

Soal pariwisata

Namun demikian, Sultan enggan menutup seluruh objek wisata karena Pemda DIY tak cukup anggaran untuk mengganti kerugian pelaku pariwisata apabila mereka harus ditutup. "Kalau tidak ada orang datang, (tempat wisata) tidak akan buka. Tapi kalau kami tutup (objek wisata) saya harus mengganti (rugi) mereka. APBD saya enggak akan

mampu menutup rumah makan, enggak akan mampu ganti rugi," ujar Sultan.

Menurut Ngarso Dalem, apabila mobilitas masyarakat yang berkunjung ke DIY mulai berkurang, secara berkala pengelola wisata akan tutup dengan sendirinya. "Kalau enggak ada (kunjungan) kan juga tutup sendiri seperti kemarin," ungkap Ngarso Dalem.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadamanta Baskara Aji menambahkan, pihaknya sudah menyebut jika daerah dengan dengan tingkat kerawanan penularan Covid-19 cukup tinggi atau termasuk ke dalam zona merah, wajib menutup objek wisata secara berkala. "Kemudian pengunjungnya kami batasi jumlahnya menjadi 25 persen dari kapasitas ruang. Jadi ini sudah kondisinya darurat. Saya kira semua harus menyadari," tambahnya.

Dewan sepakat

Pimpinan DPRD DIY mendukung opsi karantina wilayah atau *lockdown* yang dikeluarkan oleh Sultan. Ketua DPRD DIY Nuryadi mengatakan, situasi Covid-19 di DIY saat ini sangat memprihatinkan.

Ia menjelaskan, penyebaran Covid-19 sebelum lebaran yang dinilai masih sangat landai tidak dapat dipertahankan oleh Pemda DIY. "Tapi (kini) justru balik 180 derajat, saat ini angka penularannya sudah

di atas 500 orang (per hari). antisipasinya yakni di wilayah harus ada pembatasan. Daripada kondisi DIY semakin tidak terkendali, maka saya mendukung gagasan Ngarso Dalem tersebut," katanya, Jumat (18/6).

Nuryadi menegaskan, dalam situasi seperti saat ini, tidak boleh saling menyalahkan. Ia meminta baim masyarakat maupun pemangku kebijakan harus kompak dalam menghentikan penularan Covid-19 di DIY.

Dukungan *lockdown* juga muncul dari Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudi-ana. Dia setuju apabila ada kebijakan *lockdown* diterapkan di wilayah DIY. "Intinya jika muncul kebijakan itu, kami juga sependapat. Karena kondisi sekarang memang sudah luar biasa," jelasnya.

Huda menegaskan, rumah sakit (RS) rujukan Covid-19 di DIY sudah penuh, begitu pun dengan selter untuk isolasi mandiri. "Kalau tidak ada tindakan tegas, saya khawatir Jogja bisa lumpuh. Saya kira opsi *lockdown* dipertimbangkan dan dikaji, nanti Pak Gubernur akan memutuskan itu," tegas politikus PKS itu.

Meski setuju dengan kebijakan itu, Huda turut mempertimbangkan dampak ekonomi apabila kebijakan itu betul-betul diterapkan. "Memang harus dipertimbangkan betul. Karena ekonomi juga harus berjalan," ujarnya. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 14 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005